



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01.401968

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2026

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 401968**

**Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2026**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**).

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	08
V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya.....	09
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	12
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
A.3. Basis Akuntansi.....	13
A.4. Dasar Pengukuran.....	13
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	23
B.1. Pendapatan.....	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	27
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	27
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	27
C.3. Persediaan.....	27
C.4. Tanah.....	29
C.5. Peralatan dan Mesin.....	29
C.6. Gedung dan Bangunan.....	29
C.7. Aset Tetap Lainnya.....	29

C.8.	Akumulasi Penyusutan.....	30
C.9.	Aset Lainnya.....	30
C.10.	Uang Muka dari KPPN.....	31
C.11.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan.....	31
C.12.	Ekuitas.....	31
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	32
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	32
D.2.	Beban Pegawai.....	33
D.3.	Beban Persediaan.....	33
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	34
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	35
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	35
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	36
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	36
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1.	Ekuitas Awal.....	37
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	37
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	37
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	38
E.5.	Ekuitas Akhir.....	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	39
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	39
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	39

Lampiran-lampiran

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Terpadu, Pangkalpinang - BABEL

Telp. 0717-911151, e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I 2026 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I 2026 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Nayalla Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang SEMESTER I 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada 2026 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.0,-** dari estimasi pendapatannya sebesar **Rp 134.000,-**

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar **Rp 10.481.325.152,-** atau mencapai **56% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 18.615.095.000,-**

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 25.621.193.617,-** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 62.035.724,- ; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 25.559.157.893,- Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.039.673.896,- Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 24.581.519.721,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp 25.621.193.617,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.10.606.459.966,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.10.606.459.966,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa bernilai Rp 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) - LO sebesar (Rp.10.606.459.966) .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 24.706.654.535,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp.10.606.459.966,-), kemudian ditambah dengan koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 10.481.325.152,- menghasilkan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. (125.134.814,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai **Rp. 24.581.519.721,-**

5. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berisi informasi keuangan tertentu yang tersaji sampai dengan 30 Juni 2026 . Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi pendukung atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	2026			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	134.000	0	(134.000)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	134.000	0	(134.000)	0
B	BELANJA				0
	I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	18.615.095.000	10.481.325.152	(8.133.769.848)	56
	BELANJA PEGAWAI	16.510.108.000	9.546.431.348	(6.963.676.652)	58
	BELANJA BARANG	2.014.167.000	934.893.804	(1.079.273.196)	46
	BELANJA MODAL	90.820.000	0	(90.820.000)	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	II. TRANSFER KE DAERAH	0	0	0	0
	DANA BAGI HASIL	0	0	0	0
	DANA ALOKASI UMUM	0	0	0	0
	DANATRANSFER KHUSUS	0	0	0	0
	DANA OTONOMI KHUSUS	0	0	0	0
	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	0	0	0
	DANA DESA	0	0	0	0
	DANA INSENTIF FISKAL	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	18.615.095.000	10.481.325.152	(8.133.769.848)	56
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36.000.000	0	36.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.275.000	0	4.275.000	0
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	0	325,600	(325,600)	(100)
Persediaan	21.760.724	19.320.240	2.440.484	12.63
JUMLAH ASET LANCAR	62.035.724	19.320.240	42.389.884	215,77
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,664,791,903	7,664,791,903	0	0.00
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(8.711.151.999)	(7,843,768,304)	(867.383.695)	11,06
JUMLAH ASET TETAP	25.559.157.893	26.426.541.588	(867.383.695)	(3,28)
Aset Lain-lain	0	20.290.000	(20.290.000)	(100)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0	(20.290.000)	20.290.000	(100)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	25.621.193.617	26.446.187.428	(824.993.811)	(3,12)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	962.671.396	1.739.532.893	(776.861.497)	(44,66)
Utang Yang Belum Ditagihkan	41.002.500	0	41.002.500	0
Uang MUka dari KPPN	36.000.000	0	36.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.039.673.896	1.739.532.893	(699.858.997)	(40,23)
JUMLAH KEWAJIBAN	1.039.673.896	1.739.532.893	(699.858.997)	(40,23)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24.581.519.721	24.706.654.535	(125.134.814)	(0,51)
JUMLAH EKUITAS	24.581.519.721	24.706.654.535	(125.134.814)	(0,51)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.621.193.617	26.446.187.428	(824.993.811)	(3,12)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	8.784.150.423	2.192.019.662	6.592.130.761	300,733
Beban Persediaan	27.219.100	15.514.890	11.704.210	75,439
Beban Barang dan Jasa	565.436.022	339.506.500	225.929.522	66,546
Beban Pemeliharaan	322.077.895	185.862.156	136.215.739	73,289
Beban Perjalanan Dinas	40.192.831	37.892.010	2.363.821	6,249
Beban Penyusutan dan Amortisasi	867.383.695	913.303.422	(45.919.727)	(5,028)
JUMLAH BEBAN	10.606.459.966	3.684.035.640	6.922.424.326	187,903
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,903
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	

Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,903
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT – LO	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,903

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2026 DAN 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2025	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24.706.654.535	27.692.750.778	2.986.096.243)	(10,78)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.606.459.966)	(3.684.035.640)	(6.922.424.326)	187,9
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	10.481.325.152	2.786.157.769	7.695.167.383	276,19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(125.134.814)	(897.877.871)	772.743.057	(86,06)
EKUITAS AKHIR	24.581.519.721	26.794.872.907	(2.213.353.186)	(8,26)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V.LAPORAN KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Laporan Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 Juni 2026

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu	16.510.108.000	2.014.167.000	90.820.000	18.615.095.000
B. Realisasi s.d 30 Juni 2026	9.546.431.348	934.893.804	0	10.481.325.152
C. % Realisasi s.d 30 Juni 2026	58%	46%	0%	56%
D. Pagu Blokir	-	-	-	-
E. % Realiasi setelah memperhitungkan pagu blokir (B/(A-D))	58%	46%	0%	56%
F. <i>Trajectory</i> IKPA	-	-	-	-
G. Sisa pagu s.d 30 Juni 2026 termasuk blokir (A-B)	6.963.676.652	1.079.273.196	90.820.000	8.133.769.848

Sampai dengan Juni Semester I 2026, realisasi belanja pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar Rp. 10.481.325.152 atau setara dengan 56%.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran Per 30 Juni 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	015	005	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,21 20 19,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,80	99,65 25 24,91	99,65	99,75	100,00%	0,00	99,75

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 99,75 % dan jika dikonversi bobot 100% dan nilai akhir 99,75

2. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA JUNI SEMESTER I 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Rincian Output	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
005.01.WA.1 071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	90.820.000	90.820.000	0	20	0	Unit	99	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
005.01.WA.6 986.EBA.962	Layanan Umum	1.440.000	0	0	2	1	Laporan	99	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/ masih dalam proses
005.01.WA.6 986.EBA.994	Layanan Perkantoran	18.522.535.000	10.481.025.188	56,59	2	1	Layanan	65,33	
005.01.WA.6 986.EBA.953	Layanan pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100	1	1	Dokumen	100	
	Total	18.615.095.000	10.481.325.152	99,18					

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahunan semester I 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Modul Aset Tetap SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan 22 (dua puluh dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. **Revisi I** tanggal 24 JUNI 2025 berupa Revisi Efisiensi Anggaran Sehubungan dengan Direktif Presiden.
2. **Revisi II** tanggal 6 Februari 2026 berupa Revisi Penambahan PAGU Tunjangan Jabatan Hakim dan Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026.
3. **Revisi III** tanggal 6 Maret 2026 berupa Revisi Pemutakhiran POK Terkait Penambahan Detil Belanja Tunjangan Beras Gaji ke 13 dan 14.
4. **Revisi IV** tanggal 9 April 2026 tentang Revisi ABT Belanja Gaji Pegawai (SP SABA)
5. **Revisi V** tanggal 15 April 2026 berupa Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
6. **Revisi VI** tanggal 17 Juni 2026 tentang Revisi ABT PAGU Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
7. **Revisi VII** tanggal 24 Juni 2026 tentang Revisi Pemutakhiran POK.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	6.927.529.000	16.510.108.000
Belanja Barang	2.001.886.000	2.014.167.000
Belanja Modal	133.086,000	90.820.000
Jumlah Belanja	9.062.501,000	18.615.095.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp. 0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0,-

No.	Uraian	2026		
		Anggaran	Realisasi	% Real
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	134.000	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB
Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I 2026

No.	Uraian	TA 2026
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
Total Pendapatan		0

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara :
Rp10.481.325.152*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 10.481.325.152 ,- atau sebesar 56,31% dari anggaran senilai Rp. 18.615.095.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2026 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026

Uraian	2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	16.510.108.000	9.546.431.384	57,82
Belanja Barang	2.014.167.000	934.893.804	46,42
Belanja Modal	90.820.000	0	0
Total Belanja Bruto	18.615.095.000	10.481.325.188	56,31
Pengembalian Belanja	0	36	0,00
Total Belanja Netto	18.615.095.000	10.481.325.152	56,31

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026, yakni sebesar Rp 2.786.157.769,- yang menyerap 61% anggaran dari total PAGU Rp 4.589.857.000,-, Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan penurunan persentase sebesar 5%.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp9.546.431.348*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 9.546.431.348,- yang terdiri dari belanja pegawai bruto Rp.9.546.431.384,- dan pengembalian belanja sebesar Rp. 36- . Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp.934.893.804*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 934.893.804,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 4.538.000*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 4.538.000,- Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Uang di bank senilai 4.275.000 merupakan uang transportasi hakim bulan Mei 2026 yang belum diberikan ke hakim.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2026

Uraian	2026
Uang Tunai di Brankas	263.000
Uang di Bank	4.275.000
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	35.737.000
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	40.275.000

*Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp 0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026

Uraian	2026
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp21.760.724*

Persediaan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.21.760.724,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 Juni TA 2025

Uraian	2026
Barang Konsumsi	17.781.040
Bahan Untuk Pemeliharaan	3.979.684
Total	21.760.724

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan berita acara stock opname fisik .

C.4. Tanah

Tanah merupakan aset tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional kantor. Tanah memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak diperjualbelikan dalam jalannya kegiatan kantor. Aset tetap berupa tanah dalam akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan. Tanah Per 30 Juni 2026 disajikan senilai Rp 25.308.000,-.

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 adalah Rp. 7,664,791,903,- dengan nilai buku sebesar Rp 1.329.353.946,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	7,664,791,903
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklas Masuk	0
Mutasi Kurang	(0)
Reklas Keluar	(0)
Saldo per 30 Juni 2026	7,664,791,903
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(6.335.437.957)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	1.329.353.946

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan sebesar Rp 26,580,019,989,- dengan akumulasi penyusutan senilai Rp (2.375.714.042),-, sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp 24.204.305.947,-. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2022. Nilai gedung dan bangunan berasal dari segala pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan

siap digunakan meliputi biaya perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan biaya administrasi lain-lain.

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. Aset tetap lainnya disajikan sebesar Rp 190.000,- yang merupakan 2 buah monografi.

C.8. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2026 adalah sebesar **Rp (8.711.151.999,-)** yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset Peralatan dan Mesin senilai Rp 6.335.437.957,- dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp. 2.375.714.042.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9. Aset Lainnya

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Aset lain-lain Per 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp 20.290.000,- yang merupakan peralatan dan mesin berupa mesin absensi senilai Rp 6.100.000,-, kursi besi/metal senilai Rp 4.200.000,-, PC senilai Rp 9.990.000,- yang dihentikan

C.10. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 36.000.000,-
Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 962.671.396,- dan utang yang belum ditagihkan 41.002.500,- .

C.12. Ekuitas

Ekuitas:
Rp 24.581.519.721,-

Ekuitas per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 24.581.519.721,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah Rp. 0

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 2026

Uraian	2026	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
Total Pendapatan	0	0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.8.784.150.423,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.8.784.150.423,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026		
calk_lo_akun_satker_poc		
Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	819,493,640
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,530
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-36
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,401,338
511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,667,522
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	31,410,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,533,102
511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,499,680
511129	Beban Uang Makan PNS	82,352,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	69,380,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	44,550,000
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	1,496,677,940
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	5,960,900,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	124,319,250
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,215
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,071,987
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,182,255
511628	Beban Uang Makan PPPK	18,865,000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	8,910,000
JUMLAH		8,784,150,423

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan:
Rp.27.219.100

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp 27.219.100,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026

Uraian	2026
Beban Persediaan Konsumsi	27.219.100
Total Beban Persediaan	27.219.100

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.565.436.022,-*

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 565.436.022,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026		
calk_lo_akun_satker_poc		
Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	369,901,500
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	340,000
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,550,000
521211	Beban Bahan	300,000
522111	Beban Langganan Listrik	82,414,322
522112	Beban Langganan Telepon	2,155,200
522141	Beban Sewa	91,775,000
JUMLAH		565,436,022

D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan:**
Rp 322.077.895,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 322.077.895,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026			<i>calc_lo_akun_satker_poc</i>
Akun	Uraian	Jumlah	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165,311,800	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143,864,579	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12,901,516	
JUMLAH		322,077,895	

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban Perjalanan
Dinas :**
Rp.40.192.831

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Juni Semester I 2026 sebesar Rp. 40.192.831,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026

RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026			<i>calc_lo_akun_satker_poc</i>
Akun	Uraian	Jumlah	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40,192,831	
JUMLAH		40,192,831	

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Beban Penyusutan
dan Amortisasi :**
Rp. 867.383.695,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2026 sebesar Rp.867.383.695,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN JUNI 2026		
		<i>calc_lo_akun_satker_poc</i>
Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	601,547,742
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,835,953
JUMLAH		867,383,695

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026

D.8. Kegiatan Non Operasional

**Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional :** Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Semester I 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026

Uraian	2026
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.24.706.654.535,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp. 24.706.654.535,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO
: (Rp10.606.459.966,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar (Rp.10.606.459.966,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi:
Rp 0

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai berkurang aset gedung dan bangunan

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar
Entitas :
Rp10.481.325.152,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 10.481.325.152,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.481.325.152
Diterima Dari Entitas Lain	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	10.481.325.152

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp. -0 ,- sedangkan DKEL sebesar Rp.10.481.325.152,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp.24.581.519.721,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 24.581.519.721,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Pengungkapan atas Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Tidak ada PAGU Belanja penanganan Pandemi Covid-19 pada Semester I TA 2026.

F.2.2. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Semester I 2026.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 4.275.000 merupakan saldo transportasi hakim bulan Mei 2026 yang belum dikirim.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp. 887.000 merupakan data UP yang masih di bank
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 6.288.920.

F.2.5. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2026 terdapat 7 (tujuh) Revisi DIPA yaitu:

1. **Revisi I** tanggal 24 JUNI 2025 berupa Revisi Efisiensi Anggaran Sehubungan dengan Direktif Presiden.
2. **Revisi II** tanggal 6 Februari 2026 berupa Revisi Penambahan PAGU Tunjangan Jabatan Hakim dan Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026.
3. **Revisi III** tanggal 6 Maret 2026 berupa Revisi Pemutakhiran POK Terkait Penambahan Detil Belanja Tunjangan Beras Gaji ke 13 dan 14.
4. **Revisi IV** tanggal 9 April 2026 tentang Revisi ABT Belanja Gaji Pegawai (SP SABA)
5. **Revisi V** tanggal 15 April 2026 berupa Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
6. **Revisi VI** tanggal 17 Juni 2026 tentang Revisi ABT PAGU Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
7. **Revisi VII** tanggal 24 Juni 2026 tentang Revisi Pemutakhiran POK.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2026 tidak terdapat koreksi SPM, SSBP dan SSPB

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan semester I 2026 ini.